



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon (021) 3843348 Faksimile: (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 130 /SEK/KU2.1/1/2024
Sifat : Segera
Lampiran : 1 berkas
Hal : Pedoman, Perlakuan Akuntansi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Mahkamah Agung TA 2023

Jakarta 17 Januari 2024

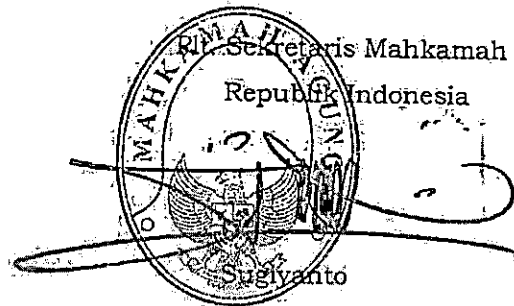
- Yth.
1. Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung
 2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung
 3. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung
 4. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding
 5. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022, bahwa seluruh satuan kerja wajib menyusun Laporan Keuangan dari Tingkat UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-EI dan UAPA, serta dalam rangka persiapan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023, maka perlu memperhatikan hal-hal sebagaimana terlampir dalam surat ini dan berpedoman pada:

1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Aktual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
2. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
3. Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor S-31/PB/PB.6/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2023 (*Unaudited*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami harap Saudara mengikuti langkah-langkah yang dibutuhkan sesuai dalam surat ini agar Laporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023 dapat disampaikan secara tepat waktu, andal dan berkualitas.

Demikian untuk dipedomani, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Sugiyanto

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung
3. Panitera Mahkamah Agung
4. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung
5. Para Kepala Badan Mahkamah Agung
6. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
7. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama